



Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Manajemen Pendidikan Dasar

Ahmad Arromi^{1*}, Siti Muthmainnah², Muhammad³

^{1,2,3}Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mataram Indonesia.

DOI : <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.993>

Received: 12 January 2025

Revised: 21 March 2025

Accepted: 24 March 2025

Corresponding Author:

Email: iinmutmainah626@gmail.com

Abstrak: Penelitian bertujuan untuk menganalisis pemerintah dalam pengelolaan pendidikan dasar. Penelitian ini melibatkan pemerintah dan sekolah dasar disekitar Mataram sebagai partisipan. Dengan menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi makalah akademis, dan telaah dokumen kinerja. Di era digital, keterampilan manajemen pendidikan dasar sangat perlu untuk beradaptasi dengan pendidikan yang terus berkembang. Temuan menunjukkan kurangnya adaptasi terhadap kebijakan pendidikan dan terbatasnya komitmen terhadap profesionalisme pemerintah dan sekolah dasar. Meskipun mencapai komitmen terhadap penulisan akademik, Pemerintah fokus pada tujuan kognitif, mengabaikan penerapan praktis di sekolah dasar dan menghadapi kendala manajemen di sekolah dasar. Dalam pendidikan dasar pemerintah harus mengkoordinir para sekolah. Pengembangan kompetensi bersifat sporadis, dengan persentase yang signifikan belum menjalani pelatihan, dan Semua responden kurang dukungan terhadap latensi pendanaan penelitian. Tindakan mendesak diperlukan untuk meningkatkan adaptasi kebijakan guru, memperluas tujuan pendidikan dasar agar mencakup penerapan praktis, meningkatkan perencanaan penerimaan peserta didik baru, dan memberikan dukungan yang konsisten untuk pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan bantuan keuangan. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan komprehensif untuk mengatasi tantangan saat ini dalam profesionalisme pemerintah dalam pendidikan dasar, sehingga memberikan kontribusi wawasan berharga untuk kebijakan dan praktik pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah; Manajemen pendidikan; Pendidikan dasar

Citation: Arromi, A., Muthmainnah, S., & Muhammad. (2025). Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Manajemen Pendidikan Dasar. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, dan Geofisika (GeoScienceEd)* 6(2), 860-865. doi: <https://doi.org/10.29303/Goescienceed.v6i2.993>

Pendahuluan

Persoalana pendidikan di zaman teknologi dan informasi sekarang ini dipandang sebagai problem yang sangat luar biasa sulit di berbagi negara. Negara-negara yang peduli terhadap masalah ini mengakui bahwa pendidikan sebagai tugas negara yang maha penting. Pendidikan merupakan kunci dalam membangun dan memperbaiki sikap individu dalam menghadapi keadaan dunia yang terancam oleh berbagai potensi bencana boleh jadi diawali oleh pemanasan global, dan tanpa kunci itu usaha tersebut akan gagal (Patrianti et al., 2020). Dalam konteks tersebut, maka setiap negara dunia terus melakukan peningkatan pendidikan masing-masing.

Indonesia, dalam hal ini melakukan perubahan sistem pendidikan guna mencapai kualitas atau mutu pendidikan yang terus menerus menuju ke arah lebih baik. Hal ini perlu diupayakan secara serius dan fokus, oleh karena peradaban masyarakat bangsa indonesia ditentukan oleh bagaimana pendidikan pendidikan dijalani oleh masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pendidikan yang tepat pada umumnya harus secara struktural dapat memaddukan daya masyarakat, negara dan dunia usaha secara tepat dan secara individual memicu mobilitas kultural, vertikal dan horisonal individu yang ketiganya pada gilirannya mengembangkan produktifitas budaya, sosial dan

Email: iinmutmainah626@gmail.com

ekonomi sekaligus menuntut pengembangan habitat yang demokratis (Badrudin et al., 2017).

Namun demikian, bila kebijakan yang diambil salah, upaya pendidikan dapat jatuh menjadi sekedar upaya memproduksi tatanan dan struktur sosial ekonomi dan politik lama dan memberikan bahan ajar materi didik, sistem pengelolaan dan akses pendidikan mauppun peluang kerja yang tidak memadai dan tidak berkeadilan (Sucipto, 2013). Ketertinggalan structural (tata hubungan kuasa) dan budaya (nilai, ilmu, teknologi, dan tata nilai hubungan kuas), akan lebih mempersulit bagi upaya transisi menuju demokrasi dan upaya memenangkan kompetisi dari globalisasi (Setianto & Anandhita, 2017).

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mengkaji berbagai literatur menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk menggali lebih dalam tentang kebijakan pemerintah terkait manajemen pendidikan dasar di Indonesia (Rahmafutri et al., 2024). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam konteks, proses, serta dampak kebijakan yang diterapkan dalam manajemen pendidikan dasar, yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga pendidikan, serta masyarakat (Nasir et al., 2023).

Langkah-langkah penelitian kualitatif ini meliputi: pengumpulan data: data dikumpulkan melalui berbagai sumber, seperti: dokumentasi kebijakan: analisis dokumen-dokumen kebijakan pemerintah, seperti peraturan, undang-undang, dan pedoman yang mengatur manajemen pendidikan dasar. Wawancara mendalam: melakukan wawancara dengan pejabat pemerintah, pengelola pendidikan, guru, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan perspektif langsung tentang implementasi kebijakan tersebut. Observasi: observasi langsung di beberapa sekolah dasar untuk melihat penerapan kebijakan pendidikan dan bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi manajemen pendidikan di lapangan; dan pemilihan informan: informan dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya dalam kebijakan manajemen pendidikan dasar (Achjar et al., 2023).

Analisis data: data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Proses ini melibatkan pengidentifikasian pola-pola atau tema-tema utama yang muncul dari data wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan manajemen pendidikan dasar. Menilai sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dengan efektif di tingkat lapangan. Menganalisis dampak kebijakan terhadap kualitas

pendidikan dasar di Indonesia. Interpretasi hasil: setelah analisis tematik dilakukan, peneliti menginterpretasikan hasil untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang keberhasilan dan tantangan dalam kebijakan manajemen pendidikan dasar. Hal ini juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kebijakan Pemerintah Manajemen Pendidikan Dasar

Pengertian Kebijakan

Kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota (city), kebijakan berkenaan dengan gagasan peraturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Rozak & Az-Ziyadah, 2021). Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "Policy" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (Wisdom) maupun kebajikan (virtues). Menurut Islamy (1999), kebijaksanaan berasal dari kata "Wisdom" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. Anam & Hanik (2020) mengatakan Wisdom dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan dan cara untuk pencapaian tujuan.

Salas & Murtadho (2023) memandang kebijaksanaan sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan-alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Sebuah kebijaksanaan dapat berwujud keputusan berupa Undang-Undang Dasar (UUD), dan Program Pembangunan Nasional. Keputusan jabarannya berupa undang-undang (UU) dan Program Pembangunan Daerah disebut kebijakan. Bila UU disebut sebagai kebijaksanaan, Peraturan Pemerintah (PP) dapat disebut kebijakan. Seterusnya bila PP dapat disebut kebijaksanaan, dan Keputusan-Keputusan Menteri (Kepmen) dapat dinamakan kebijakan, dan sebagainya pengertian kebijaksanaan yang menjadi acuan dalam pembahasan ini pemikiran/pertimbangan dan keputusan yang lebih jauh dan mendalam, bukan keputusan untuk melanggar sesuatu. Biarpun istilah

kebijaksanaan dan kebijakan memiliki perbedaan pengertian seperti dikemukakan diatas, tetapi kedua kata itu mempunyai pula persamaan. Persamaannya kebijaksanaan dan kebijakan diartikan sebagai suatu tindakan terarah tertentu oleh aktor (pemerintah) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memuat aturan (asas, norma) tertentu memecahkan untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Lasswell dan Kaplan, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah (Supriatini et al., 2019). Rakasataya, mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Friedrich, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Mac Rae dan Wilde, mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih dan mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang.

Pengertian Pemerintahan

Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata "Pemerintah". Sedangkan kata pemerintah berasal dari kata "Perintah". Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu (Makalew et al., 2021). Pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu Negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Kemudian pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan dan sebagainya) memerintah.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda yakni kata pemerintah menunjukkan kepada subjek atau orang-orang/pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Sebab bila tidak mempunyai kekuasaan berarti tidak bisa memerintah. Kata pemerintah menunjukkan perbuatan para pemimpin itu melakukan tugas dan fungsinya sesuai kekuasaan yang dimilikinya itu. Tetapi pada akhirnya kedua istilah tersebut digunakan orang secara bergandengan atau silih berganti. Karena dalam kepustakaan Inggris dijumpai perkataan "Government" yang sering diartikan sebagai "Pemerintah" ataupun sebagai "Pemerintahan".

Samuel Edward Finer dalam bukunya *Comparative Government*, menyatakan bahwa istilah *government* paling sedikit mempunyai empat arti yang menunjukkan; (1) Kegiatan atau proses memerintah yaitu melaksanakan control/pengawasan atau pihak lain, (2) Masalah-masalah (hal ihwal) negara dalam mana kegiatan atau proses diatas dijumpai, (3) Orang-orang (maksudnya pejabat-pejabat) yang dibebani tugas untuk memerintah, dan (4) Cara metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah.

Dari pengertian diatas, Finer mengakui ada pemerintah dan pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. S. Pamudji dalam bukunya: *kepemimpinan pemerintahan di Indonesia* mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional).

Pemerintahan dalam arti sempit diartikan sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajaran dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara. Istilah eksekutif dari pendapat diatas dilihat dari konotasi politik yaitu suatu cabang pemerintahan dalam arti luas. Sementara dalam arti administrasi, eksekutif adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain dan menjadi perantara mengalir perintah-perintah dan kebijakan dari administrator kepada para pegawai.

Definisi Kebijakan Pemerintah

Definisi kebijakan pemerintah telah banyak dikemukakan para ahli. Beberapa definisi kebijakan pemerintahan dari para ahli sebagai berikut: Mc Rae dan Wilde mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai Serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang (Arifin, 2022). Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintah dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah.

Satu contoh dari definisi ini seperti; keputusan seorang Rektor menerima seorang mahasiswa pindahan dari Universitas lain, itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah, karena hanya berlaku dan berdampak pada seorang. Tetapi bila keputusan tersebut berkenaan dengan penentuan syarat-syarat yang diperlukan bagi semua mahasiswa pindahan dan lain-lain hal yang berkaitan dengan masalah itu hal itu baru disebut sebagai kebijakan pemerintahan.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai "Apapun yang dipilih oleh

pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu” (Dye, 1984). Maksud definisi ini bahwa bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu tindakan misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah diatas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu, ini di namakan kebijakan pemerintahan. Sebaliknya tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk untuk mendirikan rumahnya diatas miliknya, maka itupun disebut kebijakan pemerintahan. Kedua tindakan pemerintah itu memberikan pengaruh (dampak) yang sama besarnya kepada masyarakat.

Young & Quinn (2002) mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai tindakan yang tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya. Definisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan itu merupakan tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah/negara, termasuk didalamnya kewenangan hukum, politik dan finansial.

Anderson (2017) mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai “Kebijakan- kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah”. Jadi menurut Anderson, setiap kebijakan pemerintahan selain dapat dikembangkan oleh badan-badan pemerintahan seperti; lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif, juga oleh pejabat pemerintah baik di level nasional, regional maupun lokal. Disini kebijakan pemerintahan itu dapat dikembangkan oleh lembaga/badan-badan pemerintahan, pula oleh pejabat pemerintah pada lembaga/badan itu baik di skope nasional, regional dan lokal.

Easton (1950) mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai “Pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat”. Maksud definisi ini bahwa hanya pemerintahlah yang secara sah dapat memaksakan sesuatu (nilai-nilai) kebijaksanaan/kebijakan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Satu contoh; pemerintah dapat memaksa siapapun yang memasukan barang dagangan dari luar ke dalam negeri untuk membayar bea masuk (pajak import), mendeportasi orang asing, dan lain-lain.

Maksud definisi ini bahwa, kebijakan pemerintah itu mempunyai ukuran (asas) dari tindakan tertentu dalam suatu waktu tertentu pula untuk menjawab/memecahkan masalah atas keadaan kritis yang dihadapi masyarakat. Salah satu contoh seperti ; pemerintah membangun rumah-rumah murah (sederhana) bagi masyarakat yang berpendapatan rendah yang belum memiliki rumah sendiri di seluruh daerah.

Definisi kebijakan pemerintahan dan contoh-contoh sebagaimana terlihat diatas, dapat membuat anda memahami apa yang disebut kebijakan pemerintahan itu. Dengan demikian, secara umum muncul sebuah definisi mengenai kebijakan pemerintahan adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan dialokasikan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat seluruhnya.

Definisi kebijakan pemerintahan seperti terurai diatas secara umum memiliki 6 (enam) implikasi sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintahan itu berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah (berupa program, nilai, taktik dan strategi).
2. Tindakan-tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat.
3. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintahan seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum dan finansial untuk melaksanakannya.
4. Tindakan-tindakan pemerintah itu untuk memecahkan masalah masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.
5. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu.
6. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat/publik.

Kebijakan Pemerintah dalam Manajemen Pendidikan Dasar Di Indonesia

Manajemen pendidikan dasar merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia, kurikulum, sarana dan prasarana, serta evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam hal ini, teori manajemen pendidikan yang digunakan untuk mengelola sistem pendidikan dasar harus mendukung perkembangan potensi peserta didik secara optimal.

Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti kurikulum Merdeka, penguatan akreditasi sekolah, dan pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat dasar dan menciptakan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan Pemerintah tentang Manajemen Pendidikan Dasar

Kebijakan Kurikulum

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah menetapkan Kurikulum merdeka mempunyai tujuan yaitu untuk memecahkan masalah pendidikan. Keberadaan kurikulum mengarah pada pengembangan kekuatan dan kompetensi siswa. Program pelatihan ini berfungsi untuk mengembangkan potensi. Salah satunya adalah pembelajaran yang dirancang relevan dan interaktif. Melalui pendekatan ini, siswa diharapkan memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi minat mereka tanpa terikat oleh program peminatan yang kaku. Kurikulum ini juga bertujuan meningkatkan partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar serta mengurangi ketertinggalan akademis.

Pemberdayaan Guru dan Tenaga Pendidik

Salah satu kebijakan penting dalam manajemen pendidikan dasar adalah pelatihan dan sertifikasi guru. Pemerintah mengeluarkan program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PPPG) dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi guru. Hal ini penting karena kualitas pengajaran sangat dipengaruhi oleh kualitas tenaga pendidik.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Untuk memastikan akses pendidikan yang merata, pemerintah memberikan dana BOS kepada sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dana ini digunakan untuk mendukung operasional sekolah, termasuk pembayaran gaji guru honorer, pembelian sarana pendidikan, dan pembiayaan kegiatan pendidikan lainnya.

Sekolah Ramah Anak (SRA)

Salah satu kebijakan yang juga diterapkan adalah menjadikan sekolah sebagai tempat yang ramah bagi anak. Kebijakan ini berfokus pada menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara holistik.

Implementasi Kebijakan Manajemen Pendidikan Dasar

Penerapan Kurikulum

Meskipun sudah diterapkan, kurikulum ini masih menghadapi tantangan dalam hal pemahaman dan penerapannya di lapangan. Banyak guru yang belum sepenuhnya siap dengan perubahan kurikulum ini, sehingga menghambat efektivitasnya dalam pembelajaran.

Pelatihan dan Sertifikasi Guru

Program pelatihan dan sertifikasi guru telah berhasil meningkatkan profesionalisme guru, namun masih ada ketimpangan antara kualitas pendidikan di perkotaan dan daerah terpencil. Guru di daerah kurang berkembang seringkali tidak mendapat akses pelatihan yang memadai.

Dana BOS

Meskipun Dana BOS sangat membantu dalam pembiayaan operasional sekolah, masih ada isu terkait pengelolaan dana yang kurang transparan di beberapa daerah. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam distribusi dana yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah yang lebih terpencil.

Tantangan dalam Manajemen Pendidikan Dasar dan Dampak Kebijakan Terhadap Kualitas Pendidikan

Tantangan dalam Manajemen Pendidikan Dasar **Kesenjangan Kualitas Pendidikan**

Terdapat kesenjangan antara kualitas pendidikan di kota dan di daerah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali kekurangan fasilitas, buku, dan tenaga pengajar yang berkualitas.

Ketimpangan Infrastruktur

Infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah, fasilitas sanitasi, dan akses internet di daerah-daerah tertentu masih sangat terbatas, menghambat proses belajar mengajar yang efektif.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Terbatas

Kualitas tenaga pendidik di beberapa daerah masih belum merata. Banyak guru di daerah terpencil yang belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan.

Dampak Kebijakan Terhadap Kualitas Pendidikan **Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan**

Kebijakan yang melibatkan Dana BOS, kurikulum baru, dan pelatihan guru telah berkontribusi pada peningkatan akses pendidikan di berbagai wilayah, meskipun masih ada daerah yang tertinggal.

Peningkatan Kualitas Pengajaran

Program sertifikasi guru dan pelatihan telah berperan penting dalam meningkatkan kualitas pengajaran, namun penerapan kurikulum dan pengelolaan kelas masih perlu disempurnakan agar berdampak lebih besar.

Kesimpulan

Kebijakan pemerintah mengenai manajemen pendidikan dasar, meskipun sudah memiliki dampak positif, masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi implementasi maupun pengelolaan sumber daya. Diperlukan perbaikan dan pemantauan yang lebih efektif terhadap kebijakan yang ada agar pendidikan dasar di Indonesia semakin merata dan berkualitas. Fokus pada peningkatan kualitas guru dan pemerataan fasilitas pendidikan di daerah-daerah terpencil harus menjadi prioritas dalam kebijakan pendidikan mendatang.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian yang kita lakukan tak mungkin bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kita bisa meminta bantuan dari beberapa mitra penelitian. Kita bisa menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka dengan kalimat seperti ini: "Saya ingin mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra penelitian saya yang telah membantu dalam pengumpulan data. Tanpa bantuan kalian, penelitian ini tak mungkin bisa berjalan dengan lancar.”

Referensi

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., Abadi, A., & others. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk analisis data kualitatif dan studi kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anam, S., & Hanik, E. U. (2020). Problematika kebijakan pendidikan di tengah pandemi dan dampaknya terhadap proses pembelajaran di sekolah dasar. *Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 73–81.
- Anderson, C. W. (2017). The place of principles in policy analysis. In *Ethics in planning* (pp. 193–215). Routledge.
- Arifin, Z. (2022). *Kebijakan Pemerintah Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Dalam Pengendalian Pandemi Covid-19*. Thesis: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Badrudin, B., Purwanto, Y., & Siregar, C. N. (2017). Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia. *Jurnal Lektur Keagamaan*, 15(1), 233–272.
- Dye, T. R. (1984). Party and Policy in the States. *The Journal of Politics*, 46(4), 1097–1116.
- Easton, D. (1950). Harold Lasswell; Policy scientist for a democratic society. *The Journal of Politics*, 12(3), 450–477.
- Islamy, I. (1999). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi antara Pemerintah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan umat beragama di Kota Manado. *Governance*, 1(1).
- Nasir, M., Mahmudinata, A. A., Ulya, M., & Firdaus, F. A. (2023). Strategi pemberdayaan sekolah sebagai upaya peningkatan manajemen pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2).
- Patianty, T., Shabana, A., & Tuti, R. W. D. (2020). Government risk communication on greenhouse gas emission reduction to tackle climate change. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2), 479048.
- Rahmafritri, F., Deswita, E., & Trisoni, R. (2024). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45–55.
- Rozak, A., & Az-Ziyadah, A. I. (2021). Kebijakan pendidikan di Indonesia. *Alim: Journal of Islamic Education*, 3(2), 197–208.
- Salas, M. K., & Murtadho, M. I. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Peningkatan Mutu dan Standarisasi (Akreditasi) Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(1), 26–33.
- Setianto, B. D., & Anandhita, G. (2017). *Unika Dalam Wacana Publik 2017-2018: Transformasi Inspiratif*. SCU Knowledge Media.
- Sucipto, B. (2013). Lembaga Pendidikan Islam dan Perubahan Sosial. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 18(3), 483–501.
- Supriatini, S., Muhdi, M., & Yuliejantiningasih, Y. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Bolo Kabupaten Demak. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(3).
- Young, E., & Quinn, L. (2002). Writing effective public policy papers. *Open Society Institute, Budapest*.